

DETEKSI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang (Eni Suharti 1)
email: suharti_eni@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Tangerang (Dewi Rachmania 2)
email: dewi.rachmania78@gmail.com

Abstract

The research is aimed to analyzed the tax evasion which is caused by the application of tax rates and tax officer services, the benefits of this research are expected to provide a point of view to the tax payers in understanding tax evasion. The large number of tax evasion cases carried out by corporate tax payers caused the realization of tax revenue not be reach. Data analysis method in this researched used is a linear regression model, t and f test and coefisien of determination with a population of 98 is obtained from the Slovin formula. The result of this reseach show indicates that the application of the tax rate does not effect tax evasion while the service of tax officers has a negative effect on tax evasion. in the simultaneously the result of this reseach indicates the variable tax rates and tax authorities effect the tax evasion.

Keywords: *Tax Rate, Tax officer services, Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana sebagian besar pengeluaran negara bersumber dari Pajak, baik pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk itu pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari pajak. Namun, dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak mematuhi undang-undang pajak baik dengan sengaja yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion) maupun karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perpajakan itu sendiri.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Hal tersebut akhirnya membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak sesuai dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Ada banyak kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai dari diberlakukannya Tax Amnesty sampai dengan dikeluarkannya rencana penurunan tarif dari 1% menjadi 0.5% untuk tarif pajak PPh final UMKM, Tarif Pajak yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak merasa keberatan dalam membayar Pajak, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Permatasari yang menyatakan bahwa apabila tarif Pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak mengalami peningkatan maka kebanyakan wajib Pajak akan enggan untuk membayarkan kewajibannya.

Kasus penggelapan pajak atau sering disebut dengan Tax Evasion yang terjadi di Indonesia didominasi oleh Wajib Pajak besar yaitu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Kaltim Prima Coal, PT. Indosat, PT. Ancora Mining, PT. Bumi Resources dan yang terakhir adalah PT. Asian Agri. Dari perusahaan-perusahaan tersebut penggelapan pajak yang dilakukan berbeda-beda. PT. Kaltim Prima Coal melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan SPT Lebih Bayar yang

seharusnya kurang bayar atau melaporkan SPT secara tidak benar, PT. Indosat melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi SPT PPn yaitu memperbesar PPn Masukan dan memperkecil PPn keluaran sehingga PT. Indosat dapat meminta Restitusi hal ini dilakukan dengan cara berkonspirasi dengan pejabat tinggi Negara dan otoritas terkait untuk melakukan penipuan Akuntansi, sedangkan, PT Bumi resource melakukan penggelapan pajak dengan cara membayar petugas pajak dalam pengurusan surat ketetapan Pajak. Kondisi lingkungan yang baik dimana komunitas lingkungan tersebut adalah orang-orang yang patuh dalam hal kewajiban perpajakan tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak begitu juga sebaliknya walaupun pemerintah telah membuat sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Kasus dimasyarakat keengganan masyarakat membayar pajak adalah karena pelayanan dari fiskus yang kurang memuaskan bahkan cenderung mengecewakan, masyarakat berfikir bahwa mereka akan memberikan uang kepada negara akan tetapi perlakuan dari fiskus kadangkala seperti mereka ingin meminta sesuatu dari negara, belum lagi tarif pajak yang dirasa cukup tinggi dan tidak berkeadilan,

Perusahaan atau wajib pajak dapat terindikasi melakukan penggelapan pajak jika WP Tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT dengan tidak benar, Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP, Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dan Berusaha menyuap fiskus (Waluyo 2013:30)..

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. KAJIAN LITERATUR

1. *Theory of planned behavior* (TPB) / Teori Perilaku Yang Direncanakan

Theory of planned behavior merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007). Teori Perilaku yang direncanakan (TPB) lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin timbul akibat kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya. Menurut Jogiyanto (2013) model teori ini mengandung berbagai variabel yaitu pertama menyangkut latar belakang (*background factors*). Kedua terkait keyakinan perilaku (*behavioral belief*) adalah hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut. Ketiga, keyakinan normatif (*normative beliefs*) yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan. Keempat, norma subjektif (*subjective norm*) yakni sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Kelima, persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (*perceived behavioral control*) yakni kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dari uraian diatas maka *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak baik pribadi maupun badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pajak

Pengertian Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Waluyo (2017) Pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah fungsi penerimaan (*budgeter*), fungsi mengatur (*reguler*), fungsi alokasi, dan fungsi distribusi.

3. Penggelapan Pajak (*Tax Evation*)

Pohan (2015) menyatakan ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni *Tax Avoidance*, *Tax Evasion* dan *Tax*

Saving. Tax Evasion adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupannya pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

4. Tarif Pajak

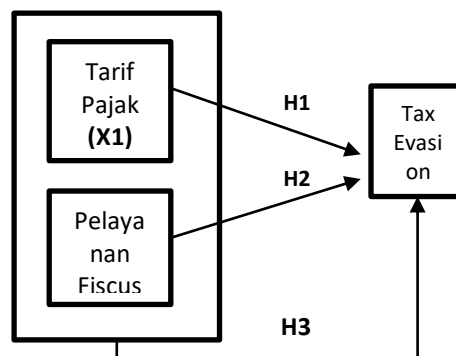
Tarif pajak adalah ketentuan presentase atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar atau objek pajak (Sudirman dan Amiruddin, 2016). Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013). Adanya aktivitas manajemen pajak dapat dikatakan adanya aktivitas penghindaran pajak. harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Tarif pajak juga merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum 2012). Dimulai dari menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan dapat meningkatkan wajib Pajak dalam membayar Pajak, sehingga kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya

B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak terhadap

Tarif pajak adalah besarnya jumlah perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak. Indikator penelitian ini adalah kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Pada penelitian Kurniawati dan Toly (2014) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

- H1 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Kosambi Tangerang.
2. Pelayanan Fiskus
 Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak harus yang berkualitas agar terciptanya kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya dan otomatis optimalisasi penerimaan pajak akan berjalan lancar. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin menurun potensi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Tobing 2015 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak..
- H2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Kosambi Tangerang.
3. Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus
 Tarif Pajak yang diterapkan harus mengandung azas keadilan sehingga wajib Pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan kemampuannya, serta didukung dengan Pelayanan yang baik sehingga tercipta Kepuasan wajib Pajak..
- H3 : tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus bersama sama berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada perusahaan yang terdaftar di KPP Kosambi Tangerang.

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dan bersifat asosiatif, data yang digunakan berupa kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert, meliputi variabel tarif Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Tax Evasion (Y)

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel variable yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Variabel Dependen, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tax Evasion (penggelapan pajak), Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2012) indikator dalam Tax Evasion diantaranya : Tidak Menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT tidak benar, Tidak Mendaftarkan diri/ Menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP, Tidak Menyetorkan Pajak yang dipungut atau dipotong, Berusaha menyuap Fiskus
2. Variabel Independen, Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2). Indikator Tarif Pajak : Kemampuan dalam membayar Pajak sesuai tarif dan tarif Pajak yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Indikator Pelayanan Fiskus : Kualitas Sumber daya manusia yang dimiliki (skill), Pengetahuan (Knowledge) dan Pengalaman (Experience)

C. Metode Pengambilan Sample dan Kriteria Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi pada tahun 2019 dengan jumlah populasi sebanyak 3434 sedangkan tehnik pengambilan sample dengan menggunakan tehnik probability sampling dengan menggunakan rumus slovin sehingga didapat nilai sample sebanyak 98 wajib Pajak Badan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer sehingga metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan metode observasi dan kuesioner, Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya sedangkan

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif , metode kuantitatif merupakan bentuk analisis yang menggunakan data bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis Statistik deskriptif, dalam penelitian ini uji instrument data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, Uji Multikoleniaritas dan uji Heterokedastisitas, kemudian analisis regresi linear (baik linear sederhana maupun linear berganda) digunakan untuk mengukur keberpengaruhan variabel independen terhadap variabel dependen.Uji hipotesis (Uji t dan Uji f) juga digunakan untuk menguji apakah hipotesis dalam penelitian ini dapat dibuktikan dan untuk menguji besarnya keterberpengaruhan variabel independen terhadap variabel dependenden pada penelitian ini digunakan uji Koefisien Determinasi (R^2).

4. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi, Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi berjumlah 3434 yang terdiri dari wajib pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.Penelitian ini menggunakan objek Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi

B. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil analisis statistic Deskriptif

		Tarif pajak	Pelayanan Fiskus	Tax Evasion
N	Valid	98	98	98
	Missing	0	0	0
Mean		21.0102	28.6429	32.4184
Std. Deviation		1.70200	2.11645	3.64938
Range		8.00	11.00	18.00
Minimum		16.00	24.00	22.00
Maximum		24.00	35.00	40.00

Data SPSS diolah

Berdasarkan output SPPS statistic deskriptif, diketahui sebaran data untuk semua variabel sangat fluktuatif . dan sebaran datanya normal.

2. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 98 dan besarnya df dapat dihitung $98 - 2 = 96$, dengan df = 96 dan alpha = 0,05 didapat r tabel dengan uji dua sisi = 0,1986. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan

bernilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

korelasi (r hitung) diatas nilai kritis yaitu 0.3, dengan demikian semua instrument tersebut dinyatakan Valid.hal ini menandakan bahwa instrumen pernyataan untuk variabel Tarif Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Tax Evasion (Y) Valid

Hasil uji validitas pada indikator-indikator penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X1)

Correlations

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	JMLHx1
Pearson Correlation	.415*	.796**	.637**	.637**	.560**	1

Data SPSS di olah

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X2)

Correlations

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	JMLHx2
Pearson Correlation	.676**	.469**	.533**	.654**	.325	.461*	.643**	1

Data SPSS diolah

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Tax Evasion (Y)

Correlations

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	JMLH y
Pearson Correlation	.545**	.448*	.417*	.477**	.481**	.573**	.594*	.387*	.706**	.615**	1

Data SPSS diolah

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabil atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. suatu variabel dikatakan reliabil jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Adapun hasil uji reliabil dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table di bawah :

Tabel 5

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha	N of Items
Tarif Pajak	.618	6

Pelayanan Fiskus	.749	8
Tax Evasion	.721	11

Data diolah

Dari Hasil pengolahan data didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0.618 hal ini lebih besar dari 0.6, maka untuk instrumen pernyataan pada variabel tarif Pajak memiliki kehandalan tinggi

Dari Hasil pengolahan data didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0.749 hal ini lebih besar dari 0.6, maka untuk instrumen pernyataan pada variabel Pelayanan Fiskus memiliki kehandalan atau $0.749 > 0.60$

Dari Hasil pengolahan data didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0.721 hal ini lebih besar dari 0.6, maka untuk instrumen pernyataan pada variabel Keadilan Pajak memiliki kehandalan yang tinggi

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS nilai Asymp. Sig 0,200, hal ini mempunyai arti bahwa data yang digunakan oleh peneliti telah berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,200 ($0,200 > 0,05$).

b. Uji Multikolenieritas

Uji ini dilakukan dengan *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Agar tidak terjadi multikolinearitas, batas *Tolerance Value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$. Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah nilai tolerance untuk tarif Pajak sebesar 0.871 dan untuk Pelayanan fiskus sebesar 0.879, nilai VIF tarif Pajak sebesar 1.148 sedangkan untuk Pelayanan Pajak sebesar 1.138

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan semua variabel independen yaitu Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus dan Keadilan pajak memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dan hasil nilai perhitungan nilai *tolerance* pada setiap variabel mempunyai nilai lebih dari 0,10. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenieritas pada model regresi yaitu bahwa nilai toleransi $> 0,01$ sedangkan nilai $VIF < 10$

c. Uji Heterokedastisitas

Hasil perhitungan SPSS didapatkan bahwa nilai Variabel independen berada pada nilai diatas 0.05 (Yaitu tarif Pajak 0.853 dan Pelayanan fiskus 0.459) atau variabel independen $>$ dari 0.05 sehingga data dinyatakan terbebas dari heterokedastisitas.

4. Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linear sederhana

Uji Regresi Linier sederhana peneliti gunakan untuk meneliti apakah variabel Independen memiliki pengaruh terhadap variabel Dependen, hasil dari uji regresi linear sederhana didapat nilai constanta sebesar 30.665 dan tarif Pajak sebesar 0.84. **maka persamaan yang dihasilkan adalah :**

$$Y = 30.655 + 0.084 \text{ tarif Pajak}$$

Hasil Uji regresi linear sederhana variabel Pelayanan Fiskus didapat nilai Constanta sebesar 51.164 dan Pelayanan fiskus sebesar -0.654 , sehingga persamaan yang dihasilkan adalah :

$$Y = 51.164 - 0.654 \text{ Pelayanan Fiskus}$$

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar-beberapa variabel bebas dan terikat yang diinterpretasikan melalui suatu persamaan yang telah dibuat. Hasil dari pengujian dengan regresi linier berganda dihasilkan nilai constanta sebesar 49.256 dan Tarif Pajak sebesar 0.092 sedangkan Pelayanan Fiskus didapat nilai -0.655 , sehingga persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 49.256 + 0.092 \text{ Tarif Pajak} - 0.655 \text{ Pelayanan Fiskus}$$

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji Parsial t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam uji t ini adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian dapat dibuktikan. Dibawah adalah tabel hasil uji Hipotesis parsial (Uji t

1. Berdasarkan perhitungan SPSS , t hitung untuk variabel Tarif Pajak diperoleh 0,451 dengan signifikansi $> 0,05$. Nilai sig dari Variabel tarif Pajak sebesar 0.635 yang berarti > 0.05 Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “tarif Pajak berpengaruh terhadap tax Evasion di tolak pada selang kepercayaan 95%. T hitung 0.451 $<$ t tabel 1.98525
2. Berdasarkan perhitungan SPSS, t hitung untuk variabel Pelayanan Fiskus diperoleh -4,007 dengan signifikansi $> 0,05$. Nilai sig dari Variabel Pelayanan Fiskus sebesar 0.000 yang berarti $<$ dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap tax Evasion di terima pada selang kepercayaan 95%. T hitung -4.007 $>$ t tabel 1.98525

b. Uji F

Uji simultan f adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam uji f ini adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian dapat dibuktikan. Dibawah adalah tabel hasil uji Hipotesis simultan (Uji f)

**Tabel
Hasil Uji F**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	188.462	2	94.231	8.113	.001 ^b
Residual	1103.385	95	11.615		
Total	1291.847	97			

Data SPSS diolah

Berdasarkan tabel 5.16, f hitung untuk variabel diperoleh 8.113 dengan signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “tarif Pajak dan, Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap tax Evasion di terima pada selang kepercayaan 95%. T hitung 8.113 $<$ f tabel 2.70

6. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Dari hasil pengolahan data SPSS didapat nilai R Square variabel Tarif Pajak sebesar 0.002, hal ini berarti bahwa kekuatan variabel tarif Pajak dalam mempengaruhi Tax Evasion sebesar 0.2% berarti bahwa variabel tarif Pajak sangat lemah dalam mempengaruhi tindakan tax Evasion

Dari hasil pengolahan data SPSS didapat nilai R Square Variabel Pelayanan Fiskus sebesar 0.144, hal ini berarti bahwa kekuatan variabel Pelayanan Fiskus dalam mempengaruhi Tax Evasion sebesar 14.4% berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus tarif Pajak sangat lemah dalam mempengaruhi tindakan tax Evasion

Dari hasil Pengolahan data SPSS didapat nilai R Square sebesar 0.146, hal ini berarti bahwa kekuatan variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus secara bersama sama dalam mempengaruhi Tax Evasion sebesar 14.6% berarti bahwa variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus sangat lemah dalam mempengaruhi tindakan tax Evasion

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion

Hasil Penelitian membuktikan bahwa variabel Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Tax Evasion, hal ini dimungkinkan karena tarif Pajak telah dirasakan adil oleh wajib Pajak, dalam penentuan besarnya tarif Pajak pemerintah telah memenuhi syarat keadilan azas keadilan, wajib Pajak juga memandang bahwa tarif Pajak yang sekarang berlaku telah disesuaikan dengan objek pajak.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tax Evasion

Hasil penelitian membuktikan bahwa Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Semakin buruk pelayanan yang diberikan oleh Fiskus (petugas Pajak) maka semakin tinggi keinginan wajib Pajak untuk melakukan penggelapan Pajak (tax Evasion). Hal ini dimungkinkan bahwa wajib Pajak merasakan Pelayanan fiskus yang buruk akan membuat enggan wajib Pajak dalam membayar pajaknya, Pelayanan yang buruk seperti arogansi petugas Pajak, kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Fiskus, serta buruknya administrasi dan birokrasi yang dirasakan wajib Pajak membuat wajib Pajak merasa tidak perlu untuk membayar Pajak atau jika harus membayar maka wajib Pajak membayar dengan yang tidak semestinya.

3. Pengaruh Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tax Evasion

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara bersama sama Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Tax Evasion, hal ini dimungkinkan jika tarif Pajak tinggi dan Pelayanan fiskus buruk maka akan mempengaruhi wajib Pajak dalam melakukan penggelapan Pajak (tax evasion.)

5. SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari Variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Tax evasion, Pelayanan Fiskus Berpengaruh negatif terhadap Tax evasion, sedangkan Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus secara bersama sama berpengaruh positif terhadap Tax evasion hal ini dimungkinkan bahwa :

1. Wajib Pajak secara objektif dapat menerima besaran tarif Pajak yang telah ditetapkan dan berlaku , karena tarif Pajak yang berlaku dianggap telah sesuai dan tarif Pajak tidak dirasakan memberatkan wajib Pajak sehingga tarif Pajak bukan merupakan motif bagi wajib Pajak untuk melakukan tax evasion .
2. Wajib Pajak secara subjektif merasakan bahwa Pelayanan yang baik tentu akan membuat wajib Pajak merasa terpuaskan sedangkan Pelayanan yang buruk membuat wajib Pajak tidak merasa puas sehingga wajib Pajak beranggapan bahwa jika Pelayanan yang diberikan oleh fiskus mengecewakan maka wajib Pajak tidak harus

membayar Pajak dengan yang sesungguhnya, pelayanan yang buruk memberikan motif kepada wajib Pajak untuk melakukan tax evasion.

Dari hasil Penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyarankan :

1. **Bagi Penelitian yang akan datang**,Sebaiknya menambah lingkup objek penelitian yang digunakan atau mengganti variabel lain yang dianggap lebih relevan dan memiliki keterkaitan yang lebih mendalam seperti : system perpajakan,
2. **Bagi Pemerintah atau Fiskus**,Dalam memberikan Pelayanan sebaiknya Fiskus memberikan pelayan prima, dan menyikapi dengan bijak setiap keluhan wajib Pajak,sehingga wajib Pajak merasa Pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan Pelayanan yang diterima, fiskus juga menjalankan etika profesi secara baik dan transparansi sehingga tidak terjadi lagi adanya kerjasama antara wajib Pajak dengan petugas fiskus untuk bersama sama melakukan tax evasion.

6. REFERENSI

- Fallis, A.(2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggela*. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Halim, Abdul Et.Al (2016) , *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Handayani, A., & Cahyonowati, N. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Journal of Accounting2, Diponegoro. Semarang.
- Kurniawati, M. (2014). *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review. Surabaya.
- Mukharoroh, A. H. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak(Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Diponegoro Journal of Accounting. Semarang
- Priantara, Diaz (2012) *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana media
- Resmi, Siti, (2014)*Perpajakan, Edisi 8*, Jakarta, salemba Empat
- Siregar, Y. A., Saryadi., & Listyorini, S. (2007). *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Semarang.
- Surbakti, T. A. . (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun*. Skripsi.
- Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Tesis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sustainability, E. (2014). *The Determinants of Tax Evasion in Pakistan-a Case Study of Southern Punjab*.International Journal of Development and Economic Sustainability.Pakistan.
- Waluyo,(2013) *Perpajakan Indonesia, Edisi 11*, Jakarta, Salemba Empat

Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, Y. (2014). *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. Tax & Accounting* .